

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA



Penerapan SAPM (Sistem Administrasi Perpajakan Modern) dalam Meningkatkan Informasi Piutang Pajak

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Ciamis)

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL :

BENNY PRAWIRANEGARA, S.E., M.M. (NIDN. 0401078402)

MUJADDID FARUK, SE., M.M. (NIDN: 0424057301)

UNIVERSITAS GALUH

NOVEMBER, 2016

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Penerapan SAPM (Sistem Administrasi Perpajakan Modern) dalam Meningkatkan Informasi Piutang Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Ciamis)

Peneliti / Pelaksana :

Nama Lengkap dan NIDN : Benny Prawiranegara, S.E., M.M.
: 0401078402

Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Program Studi : Akuntansi

Nomor HP : 0815221532560

Alamat Surel (e-mail) : benny.feunigal@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap : Mujaddid Faruk, S.E., M.M.
NIDN : 0424057301

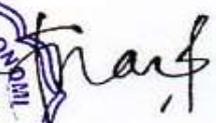
Perguruan Tinggi : Universitas Galuh Ciamis

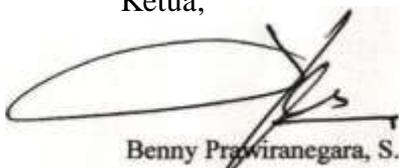
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp 11.600.000,-

Biaya Keseluruhan : Rp 11.600.000,-

Ciamis, 21 November 2016

Mengetahui,
Dekan

DR. Ani Rosliyati, S.E., M.M., Ak., CA.
NIK. 03.3112770074

Ketua,

Benny Prawiranegara, S.E., M.M.
NIK. 03.3112770209

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

Drs. H. Awang Kustiawan., M.M.
NIP. 196003081986011011

RINGKASAN

Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) dalam sistem pengolahan data elektronik terdiri dari keseluruhan metode, kebijaksanaan, dan prosedur-prosedur organisasi untuk menjamin pencapaian tujuan dari pengembangan dan penerapan sistem. Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) dilakukan secara terpadu sejak tahap-tahap awal pengembangan sistem sepanjang masa penerapan sistem tersebut serta harus menjadi bagian yang integral dari rancangan sistem yang dikembangkan. Laudon (2000: 506) mengklasifikasikan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) dalam lingkungan pengolahan data elektronik menjadi dua kategori, yaitu Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) umum dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) aplikasi.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dimana metode deskriptif menurut A.Gima Sugiana (2008 : 37) adalah riset yang berupaya mengumpulkan data, menganalisis secara kritis atas data-data tersebut dan menyimpulkannya berdasarkan fakta-fakta pada masa penelitian berlangsung atau masa sekarang meliputi ; tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati atau diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta tehnik pengumpulan data dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pencairan piutang untuk tahun 2012 hanya terealisasi sebesar 31.09%, sedangkan untuk tahun 2013 mencapai 100.34%, kemudian pada tahun 2014 naik menjadi 132.63%; 3) dan pada tahun 2015 102,20%.

Adapun kesimpulan yang telah diperoleh yaitu sebagai berikut: 1) Sistem administrasi perpajakan modern (SAPM) yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis telah cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari tiga unsur pokok yakni aspek teknologi informasi yang meliputi: Media Informasi Pajak; *e-system* perpajakan. Aspek Perangkat Keras dan Perangkat Lunak, meliputi: penyediaan computer, Adanya *Standard Operating Procedures* (SOP); Tempat Pelayanan Terpadu (TPT); *Help Desk*; *Complaint Center*, dan Aspek Sumber Daya Manusia; 2) Informasi piutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis cukup memadai. Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis berperan dalam meningkatkan informasi piutang pajak.

Kata Kunci : SAPM (Sistem Administrasi Pajak Modern), Informasi Piutang Pajak

PRAKATA

Atas Rahmat dan Inayah Allah SWT, kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian dengan judul “Penerapan SAPM (Sistem Administrasi Perpajakan Modern) dalam Meningkatkan Informasi Piutang Pajak” (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Ciamis). Maka selayaknya kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah mengelola alam semesta beserta isinya dengan sempurna.

Laporan Akhir Penelitian ini kami buat dalam upaya pertanggungjawaban pelaksanaan tri darma perguruan tinggi pada bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang mudah-mudahan bermanfaat secara pengembangan ilmu pengetahuan (teoritis) dan guna laksana (praktis) bagi masyarakat.

Akhir kata, kami menyadari sebagai manusia yang banyak memiliki keterbatasan dan hanya ALLAH SWT yang memiliki kesempurnaan seutuhnya. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca adalah sumbangsi yang tak terhingga nilainya.

Ciamis, November 2016
Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah Penelitian	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Output	4
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.2 SAPM (Sistem Administrasi Perpajakan Modern)	4
2.1 Sistem Informasi	7
 BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
3.1 Tujuan Penelitian	11
3.2 Manfaat Penelitian	11
 BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1 Metode Penelitian	13
4.2 Tahap-tahap Penelitian	13
4.3 Lokasi Penelitian	13
4.4 Peubah yang Diamati atau Diukur	13

4.5 Desain atau Model Penelitian	14
4.6 Rancangan Penelitian	14
4.7 Tehnik Pengumpulan Data	14
4.8 Tehnik Analisis Data	15
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Penerapan SAPM (Sistem Administrasi Perpajakan Modern) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Ciamis	16
5.2. Informasi Piutang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Ciamis	21
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan	27
6.2. Saran	27
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN	

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu negara dikatakan kuat bila kemandirian pembiayaan pembangunan tinggi, artinya tidak tergantung kepada hutang/pinjaman luar negeri. Setelah sektor minyak tidak lagi bisa diandalkan untuk menutup biaya pembangunan, maka pembiayaan dari sektor pajak adalah solusi yang paling realistis untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, karena tidak akan habis sumbernya, dan seiring sejalan dengan kemajuan ekonomi suatu negara. Semakin maju tingkat ekonomi suatu negara berarti potensi pajaknya juga semakin besar. Disamping itu pajak merupakan alternatif pembiayaan dengan tingkat resiko yang paling kecil bagi negara.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak memegang peranan penting dalam menentukan tingkat realisasi penerimaan pajak karena sistem self assesment yang diterapkan saat ini memberikan kebebasan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Tingkat kepatuhan yang tinggi mendorong kebijakan dan rencana pembangunan yang disusun pemerintah dapat dijalankan dengan baik.

Untuk mempermudah menjalankan kewajibannya dan menjamin keakuratan data yang disampaikan, Wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk digital yang biasa disebut dengan e-SPT. Hal tersebut baru berlaku bagi Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM). Dengan e-SPT tidak hanya Wajib Pajak yang dimudahkan, akan tetapi pemerintah (fiskus) sendiri juga akan memperoleh kemudahan–kemudahan dalam melayani Wajib Pajak dan mengadministrasikan SPT.

Berbagai kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak diberikan dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi. Kantor Pelayanan Pajak yang telah Menerapkan Sistem Administrasi Modern (SAPM) didukung sepenuhnya oleh sistem administrasi yang berbasis komputer yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI-DJP), dimana

dalam sistem ini diterapkan manajemen kasus dan sistem alur kerja sehingga memungkinkan setiap kegiatan terukur dan terkontrol.

Pengembangan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis dilakukan untuk memperbaiki praktik yang dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya peningkatan kualitas laporan piutang pajak yaitu laporan piutang pajak yang mampu menyajikan informasi pelayanan pajak yang relevan dan dapat diandalkan.

Hasil studi pendahuluan diperoleh kenyataan bahwa seringkali terjadi kesalahan pengiriman yang disebabkan oleh minimnya alat yang membantu yang digunakan. Selain itu realisasi piutang pajak yang terdapat di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis, tampak sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Informasi tentang Piutang Pajak

Tahun	Saldo Awal Tahun	Target	Realisasi
2012	3.489.000.000	525.000.000	378.000.000
2013	3.404.000.000	1.929.000.000	1.050.000.000
2014	7.126.000.000	2.684.000.000	2.845.000.000
2015	8.224.000.000	3.872.000.000	3.949.000.000

Sumber: kantor pelayanan pajak KKP Ciamis

Tabel di atas, menunjukkan bahwa realisasi piutang pajak pada tahun 2012 dan 2013 masih di bawah target yang ditentukan, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena prosedur-prosedur pengendalian tidak terlepas dari upaya untuk memperbaiki kinerja manajemen dan meningkatkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) yang berdampak pada pelayanan masyarakat. Pengukuran kinerja merupakan bagian yang sangat penting untuk mengukur tingkat wajib pajak.

Program modernisasi merupakan salah satu jawaban atau usaha pemerintah Indonesia di bidang perpajakan dalam mengatasi keterpurukan ekonomi akibat krisis moneter pada tahun 1990-an. Konsep rancangan modernisasi DJP disusun dalam situasi kondisi sebagai berikut:

1. Indonesia masih dalam situasi krisis ekonomi, yang menyebabkan turunnya rating negaa dalam memperoleh utang baru;
2. Kemampuan pembayaran utang yang hampir jatuh tempo dalam keadaan kritis;
3. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah rendah;
4. Rancangan peningkatan penghasilan sebagai salah satu prasyarat sukses modernisasi diragukan keberhasilannya;
5. Dukungan DJP yang minim karena konsentrasi terhadap tuntutan pengamanan penerimaan;
6. Isu korupsi secara umum tinggi yang mempengaruhi tumbuhnya pesimisme masyarakat;
7. Kapasitas sumber daya manusia DJP di ragukan;
8. Program baru apapun yang dibangun ditanggapi masyarakat dengan skepsi.

Modernisasi yang dilakukan menyangkut institusi/lembaga, teknologi informasi, sistem informasi, sarana prasarana termasuk sumber daya manusia. Latar belakang dibentuknya sistem administrasi perpajakan modern (SAPM) adalah untuk membentuk aparatur (pegawai) yang bersih, profesional dan bertanggung jawab, serta dapat menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan penting yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem administrasi perpajakan modern (SAPM) yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis?
2. Bagaimana informasi piutang pajak yang dihasilkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis?
3. Bagaimana penerapan sistem administrasi perpajakan modern (SAPM) dalam meningkatkan informasi piutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern (SAPM) yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis.
2. Informasi piutang pajak yang dihasilkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis.
3. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) dalam meningkatkan informasi piutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis.

1.4 Output Penelitian

Adapun Output dari penelitian ini adalah Publikasi Ilmiah, dipublikasikan pada jurnal JAWARA Galuh pada akhir research.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM)

Sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor: 587/KMK.01/2003 tanggal 23 Desember 2003, terjadi perubahan struktur organisasi yang sangat mendasar yaitu struktur organisasi Kantor Wilayah (Kanwil) beserta KPP diubah sedemikian rupa sehingga mencerminkan prototipe institusi masa depan.

Dimana pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor: 587/KMK.01/2003 tanggal 23 Desember 2003 adalah menyelenggarakan administrasi perpajakan secara modern dengan menekankan fungsi pelayanan dan pengawasan secara profesional sebagai perwujudan *customer satisfaction* dan *good corporate governance*.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern ini membawa konsekuensi terjadinya perubahan struktur organisasi maupun perubahan implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak. Struktur organisasi baru dirancang berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan jenis pajak. Dengan demikian, struktur organisasi ini relatif lebih ramping mengingat Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) dilikuidasi dan fungsi pemeriksaannya di alihkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selanjutnya, fungsi penyelesaian keberatan di alihkan ke Kantor Wilayah DJP. Dengan demikian terjadi pemisahan fungsi kerja yang sangat mendasar antara unit yang melakukan fungsi pemeriksaan dan atau penetapan dengan unit yang melakukan fungsi penyelesaian keberatan.

Adapun Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003. Mempunyai beberapa tujuan sistem administrasi perpajakan modern diantara sebagai berikut:

1. Tingkat Kepatuhan Pajak yang Tinggi
2. Tingkat Kepercayaan terhadap Administrasi Perpajakan yang Tinggi
3. Tingkat Integritas dan Produktivitas Pegawai Pajak yang Tinggi

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) untuk memberikan pelayanan prima dalam tingkat kepatuhan kepada Wajib Pajak.

Tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut:

- a. *Account Representative (AR)*
Seluruh Wajib Pajak mempunyai AR yang bertanggung jawab memberikan jawaban atas setiap pertanyaan dari Wajib Pajak. AR adalah penghubung antara KPP dan Wajib Pajak, yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional. AR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Wajib Pajak memperoleh hak-haknya secara transparan. AR memiliki pemahaman tentang bisnis serta kebutuhan Wajib Pajak dalam hubungannya dengan kewajiban perpajakan.
- b. Sistem Pembayaran Secara *On-Line*
Pembayaran dengan menggunakan fasilitas sistem pembayaran *on-line* dapat dilaksanakan melalui Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi. Sistem ini menghubungkan Bank, DJA, dan DJP secara *on line*. Setiap pembayaran direkam oleh bank dan DJP pada saat yang bersamaan. Sistem yang ada dalam DJP menerbitkan satu nomor unik yang di sebut Nomor Tanda Pembayaran Pajak (NTPP) sebagai validasi setiap setoran pajak. Data pembayaran pajak dari kantor pusat DJP akan ditransfer setiap hari ke sistem yang ada pada KPP, dan data ini secara otomatis akan dibukukan pada rekening Wajib Pajak.
- c. Sistem Pelaporan Pajak
Secara bertahap, pelaporan kewajiban yang dilakukan Wajib Pajak akan dikembangkan menuju arah pelaporan secara elektronik atau yang dikenal dengan *e-SPT*. Data dapat diimpor dari sistem komputer wajib pajak ke dalam aplikasi *e-SPT*. Data dalam *e-SPT* ditransfer ke dalam SI-DJP segera setelah diterima dan divalidasi di TPT. Data ini akan dibukukan secara otomatis ke dalam rekening Wajib Pajak yang bersangkutan.
- d. Pemusatan Tempat Pajak Terutang
Salah satu kebijakan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak adalah dengan melakukan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang secara otomatis kepada Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di KPP. Kebijakan ini dimaksudkan agar Wajib Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia mendapat pelayanan dengan standar yang sama melalui pemberian pelayanan dari satu KPP.
- e. Penyuluhan Terpadu
Sosialisasi Peraturan

KPP Pratama ciamis secara berkesinambungan akan mensosialisasikan peraturan-peraturan perpajakan dari masa ke masa yang selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dunia usaha. Hal ini untuk memperkecil kemungkinan perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dan kantor pajak.

Selanjutnya bahwa Sistem Administrasi Perpajakan Modern adanya pemisahan fungsi yang lebih jelas antara fungsi pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan dimana fungsi pelayanan dan pengawasan pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi, dan fungsi pemeriksaan pada Fungsional Pemeriksa Pajak. Fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak lebih efektif karena dilakukan melalui staff khusus yaitu *Account Representative (AR)* dimana setiap Wajib Pajak memiliki AR di KPP. Proses pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih efisien dan mengurangi birokrasi sehingga *cost of compliance* relatif lebih rendah, sebab dengan adanya AR, maka penanganan atas berbagai aspek perpajakan akan menjadi lebih cepat dan dapat dimonitor. Manajemen pemeriksaan lebih efisien dan efektif karena berada dalam satu unit dan SDM dispesialisasikan pada sektor tertentu. Sehingga koordinasi fungsi tersebut lebih baik, dan karena fungsi pemeriksaan difokuskan pada sektor-sektor usaha tertentu maka hasil pemeriksaan akan lebih efektif dengan perlakuan perpajakan yang seragam. Dalam bidang teknologi, diterapkannya aplikasi *on-line payment*, *e-SPT*, dan *e-filling* memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan mengurangi pekerjaan klerikal di KPP.

Untuk menjembatani komunikasi antara Wajib Pajak dengan KPP serta mengoptimalkan fungsi bimbingan dan konsultasi kepada Wajib Pajak, maka ditunjuk *Account Representative (AR)* untuk masing-masing Wajib Pajak. AR adalah pegawai yang ditunjuk sebagai liaison officer antara KPP dengan Wajib Pajak, dan mereka bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan secara langsung, edukasi, asistensi, serta mendorong dan mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Berbagai kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak diberikan dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi, yaitu *Help Desk*, *Call centre*, *Complain Centre*, *SMS Tax*, *e-Filling*, *e-SPT*, *On-Line Payment* dan *website*. Pelayanan yang dapat diakses melalui

website tersebut antara lain *e-conseling*, *download* formulir perpajakan, informasi perpajakan, informasi tax treaty dan informasi kurs pajak. Lain dari pada itu, salah satu kebijakan yang dipilih untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak adalah pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang. Kebijakan ini dimaksudkan agar Wajib Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia mendapat pelayanan yang sama melalui pemberian pelayanan dari satu KPP saja.

Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) dalam sistem pengolahan data elektronik terdiri dari keseluruhan metode, kebijaksanaan, dan prosedur-prosedur organisasi untuk menjamin pencapaian tujuan dari pengembangan dan penerapan sistem. Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) dilakukan secara terpadu sejak tahap-tahap awal pengembangan sistem sepanjang masa penerapan sistem tersebut serta harus menjadi bagian yang integral dari rancangan sistem yang dikembangkan. Laudon (2000: 506) mengklasifikasikan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) dalam lingkungan pengolahan data elektronik menjadi dua kategori, yaitu Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) umum dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) aplikasi.

2.2 Sistem Informasi

Sistem diartikan sebagai satu keseluruhan dan sejumlah komponen (bagian) yang saling berhubungan atau berkaitan dalam mencapai satu atau beberapa tujuan. Berikutnya pengertian lain mengatakan sistem adalah totalitas dari bagian-bagian yang saling berhubungan, dengan fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Disamping itu Poerwadarminta (2006: 1134) mengatakan bahwa “sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk satu totalitas”.

Sementara itu Prajudi dalam LAN RI (2001: 7) mengatakan setiap suatu yang terdiri atas objek atau unsur atau komponen yang bertata kaitan dan bertata hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan.

Dalam pelayanan dibutuhkan informasi yang berkualitas, dimana informasi merupakan data yang telah diproses dan mengandung arti dalam sebuah keputusan. Jadi data hanya akan menjadi informasi kalau mengandung arti.

Lucas mendefinisikan informasi sebagai *some tangible or intangible entity which reduces uncertainty about future state or event*. Sementara itu Gordon dalam LAN RI (2001: 11) menyatakan bahwa *information is a data that has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is of real or perceived value in current or prospective decisions* (informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang mengandung arti bagi penerima dan mempunyai/memiliki nilai nyata dalam keputusan, baik sekarang/saat ini maupun yang akan datang).

Dimana kegunaan informasi, ialah sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan pada tingkat manajerial. Informasi dapat memberikan data yang cermat, tepat waktu, tepat isi dan penting artinya bagi perencanaan, analisis, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) untuk mengoptimalkan pertumbuhan organisasi, sehingga informasi dapat mengurangi ketidakpastian dari data dan memberikan kepercayaan bagi pemakainya.

Piutang Pajak merupakan piutang yang diakui atas pajak hotel dan restoran serta pajak lainnya yang sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT). Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang pajak daerah yang sudah ditetapkan dengan suatu suratketetapan. Dokumen sumber Piutang Pajak ini adalah Surat KetetapanPajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan. Untuk penerimaan pembayaran dokumen sumbernya adalah STS.

Akuntansi Piutang Pajak dilaksanakan setelah adanya Surat Ketetapan pajak, yaitu dimulai dengan melakukan administrasi penagihan, membuat formulir Jurnal Aset, merekam, melakukan posting, mencetak dan membuat penjelasan atas akun piutang dalam Catatan atas Laporan Keuangan serta melaporkan kepada entitas akuntansi yang lebih tinggi. Kegiatan yang dilaksanakan dalam akuntansi piutang ini adalah merekam saldo Piutang Pajak untuk menyesuaikan saldo Piutang pajak yang ada dalam Laporan Keuangan dengan saldo Piutang Pajak

yang ada pada laporan Perkembangan Piutang Pajak di masing-masing satuan kerja.

Perekaman data saldo Piutang Pajak pada tingkat satuan kerja dilaksanakan oleh petugas akuntansi pada saat pencatatan saldo awal Piutang Pajak dan pada saat terjadi penambahan atau pengurangan saldo Piutang Pajak pada akhir periode akuntansi. Ilustrasi pencatatan yang diperlukan untuk menyajikan saldo Piutang Pajak ke dalam Laporan Keuangan.

Administrasi Pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai fungsi, sistem, lembaga dan manajemen publik. Administrasi Pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak. Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan (*clerical works*) adalah pencatatan (*recording*), penggolongan (*classifying*) dan penyimpanan (*filig*).

Salah satu faktor yang juga ikut menentukan tinggi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak, yang dalam literatur disebut sebagai *compliance cost*. Sedangkan biaya yang dikeluarkan fiskus dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsinya disebut sebagai *administrative cost*.

Time cost adalah waktu yang terpakai oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari waktu yang terpakai untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan akuntan dan konsultan pajak untuk mengisi SPT, serta waktu yang terpakai untuk pergi dan pulang ke kantor pajak.

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern (SAPM) yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis.
2. Informasi piutang pajak yang dihasilkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis.
3. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) dalam meningkatkan informasi piutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis

3.2 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang penulis laksanakan diharapkan memberikan kegunaan, antara lain :

3.2.1 Manfaat Secara Teoritis

Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Khususnya dalam perpajakan, dapat menambah pengetahuan mengenai penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM), dimana berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor: 587/KMK.01/2003 tanggal 23 Desember 2003 adalah menyelenggarakan administrasi perpajakan secara modern dengan menekankan fungsi pelayanan dan pengawasan secara profesional sebagai perwujudan *customer satisfaction* dan *good corporate governance*.

3.2.2 Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan berfikir, memperluas wawasan pengetahuan baik dalam teori maupun praktek. Dalam teori berarti memperdalam pemahaman serta penghayatan ilmu yang diperoleh dan dalam praktek berarti akan menambah pengetahuan serta mengetahui kenyataan yang sebenarnya.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Diharapkan dapat memberi kontribusi nyata dalam memahami pentingnya penerapan Sistem Administrasi Pajak Modern (SAPM) dan implikasinya atas informasi piutang pajak.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi penting bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam konsep dan praktek perpajakan dengan bidang kajian Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM).

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas pada pengumpulan data akan tetapi meliputi analisa dan menginterpretasikan tentang arti data tersebut (Sugiyono, 2008: 125)

Adapun uraian secara rinci dari metode yang digunakan meliputi ; tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati atau diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta tehnik pengumpulan data dan analisis data.

4.2 Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian penulis membagi kedalam empat tahapan yaitu : tahap kesatu observasi awal untuk menangkap fenomena penelitian dan penentuan profosisi, tahap kedua observasi langsung kepada responden untuk memperoleh data pendukung untuk kepentingan pengelolaan data, tahap ketiga analisis dan pengelolaan data penelitian dan pembuatan laporan penelitian, dan tahap keempat mengkomunikasikan dan menyerahkan hasil atau laporan penelitian kepada pihak-pihak berkepentingan.

4.3 Lokasi Penelitian

Penentuan objek penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Ciamis Jawa Barat.

4.4 Peubah yang Diamati atau Diukur

Adapun peubah yang diamati dari hasil fenomena yang telah ditetapkan penulis adalah SAPM (Sistem Administrasi Pajak Modern) dan Informasi Piutang Pajak.

4.5 Desain atau Model Penelitian

Disain atau model penelitian merupakan tipe penelitian yang akan digunakan (*Road Map*) yang disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun yang dimaksud dengan desain penelitian menurut Fred N Kerlinger dalam bukunya A.Gima Sugiama (2008 : 65) adalah

.... rencana dan struktur peneyelidikan yang disusun utnuk menjawab pertanyaan penelitian, rencana penelitian adalah gambaran menyeluruh program penelitian. Hal ini mencakup garis besar dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan penelaah, sejak merumusakan hipotesis dan implementasinya secara operasional hingga menganalis data. Sedangkan struktur adalah krangka kerja organisasi, dan relasi antara variabel yang dipelajari.

4.6 Rancangan Penelitian

Untuk lebih terarah peneliti membuat rancangan penelitian dengan menggunakan oberservasi ilmiah, yang dimaksud dengan observasi ilmiah menurut Cooper dan Schindler (2003:400) dalam A.Gima Sugiama (2008 : 167) terdiri dari :

1. Observasi tersebut dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian
2. Dirancang dan dilaksanakan secara sistematis
3. Merekam secara sistematis seluruh hal yang berhubungan dengan kejadian, keadaan, dan apapun yang dianggap baru (aneh) berkaitan dengan proporsi penelitian
4. Menggunakan kendali-kendali yang tepat
5. Melakukan perhitungan, prediksi yang valid dan reliabel, serta didasari kejadian yang diamati

4.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data sesuai dengan pendapat Sugiono (2007 : 129)... bila dilihat dari segi cara atau teklinik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuisisioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan

ketiganya. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung kegiatan pelaksanaan dilapangan mengenai Pelaksanaan perencanaan produksi

2. Riset Kepustakaan (*Library Reseach*)

Yaitu penelitian dengan membaca buku-buku literature, diktat, makalah, serta perundang-undangan lain yang diperlukan sehubungan dengan masalah yang diteliti

4.8 Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara:

1. Menganalisis secara deskriptif mengenai penerapan (SAPM) Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis dibandingkan dengan teori yang baku.
2. Menganalisis secara deskriptif mengenai sistem informasi piutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis dibandingkan dengan teori yang baku.
3. Menganalisis secara deskriptif mengenai faktor-faktor apa saja yang menghambat penggunaan metode SAPM (Sistem Administrasi Perpajakan Modern) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis dibandingkan dengan teori yang baku.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Penerapan SAPM (Sistem Administrasi Perpajakan Modern) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Ciamis

Penerapan Sistem administrasi perpajakan modern pada Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis meliputi beberapa aspek yaitu :

1. Aspek Teknologi Informasi

Aspek teknologi informasi yaitu proses pembaharuan dibidang teknologi informasi yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan yaitu berupa :

a. Media Informasi Pajak

Media informasi pajak dengan fasilitas *touch screen* disediakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis guna memberikan informasi peraturan perpajakan. Wajib pajak dapat mengakses segala hal yang berhubungan dengan pajak secara gratis

b. *e-system* perpajakan

Fasilitas pelayanan pajak yang menjadi salah satu faktor pendukung modernisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis yaitu dalam bentuk pengembangan dan penerapan sistem informasi. Terdapat beberapa *e-system* yang dapat dimanfaatkan wajib pajak maupun masyarakat luas yaitu :

c. *e-registration*

e-registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak melalui sistem online. Sistem *e-registration* ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu sistem yang digunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran Wajib Pajak secara *online* dan sistem yang digunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak

d. *e-SPT*

Adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Yang dapat diaplikasikan

adalah laporan SPT Masa PPh(e-SPT PPh), SPT Tahunan PPh(e-SPT PPh), dan SPT Masa PPN(e-SPT PPN)

e. *e-filling*

Merupakan cara penyampaian atau pengiriman SPT melalui sistem *online* dan *real time*. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

2. Aspek Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Aspek perangkat keras merupakan suatu proses pembaharuan yang meliputi dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sedangkan perangkat lunak merupakan proses pembaharuan meliputi struktur organisasi, kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi agar lebih efektif dan efisien. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis telah menerapkan pembaharuan terhadap aspek perangkat keras dan perangkat lunak di beberapa hal seperti:

- a. Penyediaan dan pengadaan 1 komputer untuk 1 pegawai pajak sebagai sarana penunjang dalam melaksanakan tugas-tugasnya
- b. Adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk setiap kegiatan perpajakan
- c. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

Tempat pelayanan terpadu(TPT) merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang terintegrasi dalam penerimaan dokumen dan pelaporan semua jenis pajak seperti Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diserahkan langsung oleh Wajib Pajak. Dokumen Wajib Pajak tersebut langsung diinput ke dalam sistem komputer oleh petugas TPT dan kemudian memberikan bukti penyerahan dokumen tersebut kepada Wajib Pajak. Sebagai bentuk pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak, dalam ruang tunggu TPT diberikan fasilitas ruang tunggu ber AC, kursi yang representatif, televisi, dan nomor antrian yang otomatis diprint pada saat Wajib Pajak masuk.

d. *Help Desk*

Help Desk merupakan fasilitas yang diberikan oleh KPP untuk memudahkan informasi yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak, yang berlokasi di *lobby* gedung KPP. Petugas yang ditugaskan di *help desk* adalah pegawai yang cakap, pandai berkomunikasi, dan memiliki pengetahuan tinggi tentang perpajakan. Fasilitas *help desk* dengan teknologi *tax knowledge base*, agar dapat memberikan jawaban dari berbagai masalah mengenai pajak, menyangkut :

- 1) Peraturan pajak yang komprehensif dan terbaru
- 2) Dikomplikasi sesuai standar Q & A, *flowchart*, dan penjelasan singkat
- 3) Dapat diakses dengan mudah dari komputer.

e. *Complaint Center*

Complaint center berfungsi untuk menampung keluhan Wajib Pajak yang terdaftar, mengenai pelayanan, pemeriksaan, keberatan, dan banding. Tidak termasuk keluhan mengenai pelanggaran kode etik. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan Wajib Pajak melalui:

- E-mail
- Telepon bebas pulsa
- Kotak Saran
- Ataupun langsung datang

3. Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia yaitu proses pembaharuan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak mencakup keahlian fiskus dalam menghitung pajak wajib pajak serta pemahaman tentang pajak yang lebih baik daripada yang dahulu serta melakukan seleksi pegawai yang ketat guna mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan penempatan aparat perpajakan sesuai kapasitasnya pada Struktur Organisasi pada setiap Kantor Pelayanan Pajak. Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis telah menerapkan *Case Managemant* (manajemen kasus) melalui Sistem Informasi Keuangan Kependidikan (SIKKA), sistem ini merupakan sistem penilaian terhadap seluruh pegawai. Dengan menggunakan SIKKA kepala bagian dapat

melakukan pengawasan (*monitoring*) terhadap pegawai, evaluasi kerja, dan memberikan target kerja kepada pegawai.

Program sistem administrasi perpajakan modern pada Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis adalah pelaksanaan peningkatan pelayanan yang prima dan pengawasan intensif kepada wajib pajak dengan cara penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

Hambatan atau masalah yang terjadi pada penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Masalah yang berkaitan dengan aspek teknologi informasi adalah sebagai berikut :
 - a. Sering terjadinya gangguan atau masalah dari segi teknis atau jaringan dalam sistem *online* salah satunya jika terjadi gangguan pada pendaftaran wajib pajak melalui *e-registration* yang mengakibatkan data wajib pajak yang akan mendaftar tidak tercantum pada TPT konter 3 di KPP Pratama Ciamis
 - b. Dengan gangguan teknis dari segi teknologi informasi maka data wajib pajak yang seharusnya dapat di-*input* atau dimasukkan ke dalam media komputer menjadi terhambat dan mengalami penumpukan
 - c. Masih banyak wajib pajak yang belum mengerti mengenai *e-system* seperti penggunaan *e-registration*, *e-SPT* serta *e-filling* dan media informasi pajak yang memberikan fasilitas pengetahuan bagi wajib pajak mengenai KPP Pratama Ciamis.
2. Aspek Perangkat Keras dan Perangkat Lunak
 - a. Masih terdapat kegiatan perpajakan yang belum sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP). Salah satu kegiatan perpajakan yang masih belum sesuai dengan SOP yaitu proses pendaftaran wajib pajak dan pembuatan NPWP, hal tersebut dapat terjadi akibat wajib pajak yang menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang lama dan berbelit-belit.
 - b. Sarana dan prasarana yang masih sering mengalami kerusakan

- c. Wajib pajak yang masih kurang pengetahuan atas fasilitas yang diberikan oleh KPP Pratama Ciamis seperti penggunaan nomor antrian otomatis dan *help desk*
3. Aspek Sumber Daya Manusia
 - a. Jumlah pegawai pajak yang masih kurang
 - b. Pengetahuan pegawai pajak mengenai teknologi informasi masih minim
 - c. Terjadinya kesalahan petugas pajak pada saat memasukan atau menginput data wajib pajak

Dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern, Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis melakukan upaya sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan pada aspek teknologi informasi
2. Melakukan proses penginputan data wajib pajak secara manual
3. Penambahan jam kerja dan tugas bagi petugas pajak
4. Sosialisasi kepada wajib pajak mengenai *e-system* dan teknologi informasi yang disediakan oleh KPP Pratama Ciamis
5. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan pada aspek perangkat keras dan perangkat lunak
6. Pengawasan(monitoring) oleh kepala bagian terhadap kegiatan perpajakan agar sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
7. engadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan mengikuti perkembangan teknologi
8. Menyediakan petunjuk penggunaan fasilitas pelayanan kepada wajib pajak
9. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan pada aspek sumber daya manusia (SDM)
10. Penambahan jam kerja atau lembur bagi pegawai pajak
11. Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh kantor pusat
12. Adanya evaluasi kerja terhadap pegawai pajak

5.2 Informasi Piutang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Ciamis

Target pencairan piutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciamis senantiasa mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pencairan piutang pajak yang dilakukan oleh Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciamis dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciamis. Berikut ini adalah jumlah rencana dan realisasi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciamis pada tahun 2012, 2013, dan 2014:

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Pencairan Piutang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015

No.	Tahun	Target Pencairan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
1	2012	116.960.990.000	36.359.923.125	31,09 %
2	2013	56.621.487.000	56.813.187.234	100,34 %
3	2014	58.949.812.000	78.184.575.474	132,63 %
4.	2015	81.735.980.000	83.534.613.182	102,20 %

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Ciamis

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pencairan piutang untuk tahun 2012 hanya terealisasi sebesar 31.09%, ini terjadi karena terdapat beberapa Wajib Pajak besar yang pindah ke KPP lain sehingga menyebabkan penerimaan pencairan piutang pada tahun 2012 hanya sebesar Rp 36.359.923.125 dari target pencairan sebesar Rp 116.960.990.000. Untuk tahun 2013 realisasi pencairan piutang melampaui target yang direncanakan dimana realisasi pencairan piutang tahun 2013 mencapai 100.34%. Sedangkan pada tahun 2014 naik secara signifikan menjadi 132.63% dan pada tahun 2015 melampaui target sebesar 102,20%.

Jumlah tunggakan pajak senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciamis melalui Seksi Penagihan secara periodik melaksanakan pengawasan perkembangan jumlah tunggakan pajaknya.

Berikut ini akan disajikan tabel Perkembangan Tunggakan untuk tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015.

Tabel 4.2
Perkembangan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Ciamis
Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015
(Dalam ribuan rupiah)

No.	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Saldo tunggakan awal tahun	393.768.040	314.414.352	306.809.190	312.497.044
2	Penambahan	114.377.885	70.154.878	73.155.201	68.498.110
3	Total (1+2)	508.145.925	384.569.230	379.964.391	380.995.154
4	Pengurangan	193.731.573	77.760.040	67.467.347	79.891.241
5	Saldo tunggakan akhir tahun	314.414.352	306.809.190	312.497.044	301.103.913

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Ciamis

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pengurangan yang terjadi relatif kecil dengan saldo tunggakan yang ada, sehingga menyebabkan penurunan saldo tunggakan akhir yang kecil dari saldo tunggakan awal. Nilai tunggakan pajak awal tahun merupakan nilai terbawa (*carrying over*) dari saldo akhir tahun pajak sebelumnya. Perubahan tunggakan pajak selama tahun berjalan dipengaruhi oleh dua hal sebagai berikut :

1. Penambahan tunggakan pajak

Penambahan tunggakan pajak ini disebabkan oleh masih terdapatnya pajak yang terhutang atau belum tertagih dari subjek pajak sehingga menyebabkan kenaikan pada tunggakan pajak.

2. Pengurangan tunggakan pajak

Jumlah pengurangan ini berasal dari adanya pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Surat Ketetapan Pembetulan/Surat Ketetapan Keberatan/Putusan Banding, Wajib Pajak pindah, dan penghapusan. Besarnya jumlah tunggakan ini selain timbul karena adanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang

belum dilunasi oleh Wajib Pajak sampai dengan jatuh tempo, juga diakibatkan karena beberapa hal sebagai berikut:

a. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak

Wajib Pajak kurang memahami ketentuan perpajakan sehingga kesadaran Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya masih kurang.

b. Masih adanya sisa pembayaran atas utang pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak

c. Kesalahan data objek pajak

Ini disebabkan oleh kesalahan dari pihak fiskus dalam mencatat jumlah utang pajaknya sehingga menyebabkan Wajib Pajak enggan membayar utang pajaknya. Hal ini menimbulkan tunggakan karena Wajib Pajak mengajukan keberatan atas utang pajaknya sampai mendapat jawaban atas kekeliruan pencatatan tersebut.

d. Tidak sampainya Surat Tagihan Pajak

Hal ini terjadi karena Wajib Pajak pindah alamat atau alamat Wajib Pajaksulit ditemukan dan Wajib Pajak tidak memberitahukan kepada fiskus sehingga fiskus mengalami kesulitan dalam menagih pajak. Namun, apabila dilihat dari target pencairan piutang dengan saldo tunggakan awal setiap tahunnya, KPP Pratama Ciamis menetapkan target pencairan piutang yang sangat kecil, yaitu tidak sampai 50% dari saldo tunggakan yang ada seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Perbandingan Target Pencairan Piutang dengan Saldo Tunggakan Awal Tahun KPP Pratama Ciamis Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015

No.	Tahun	Target Pencairan (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase
1	2012	116.960.990.000	36.359.923.125	31,09 %
2	2013	56.621.487.000	56.813.187.234	100,34 %
3	2014	58.949.812.000	78.184.575.474	132,63 %
4.	2015	81.735.980.000	83.534.613.182	102,20 %

Sumber: Data yang diolah

Dengan adanya penetapan target pencairan piutang yang sangat kecil dibandingkan dengan saldo tunggakan yang ada menyebabkan penurunan saldo tunggakan akhir yang kecil sehingga pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa antara saldo tunggakan awal dengan saldo tunggakan akhir terjadi perubahan namun tidak signifikan.

Mengingat banyaknya tunggakan yang harus diselesaikan, maka pihak KPP Pratama Ciamis mengadakan tindakan penagihan dilakukan atas utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Utang pajak yang dimaksud adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi sebagaimana ditetapkan dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Peninjauan Kembali/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Tindakan penagihan yang dilakukan meliputi penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, Pemberitahuan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Penyitaan, Pelalangan, Pencegahan dan Penyanderaan.

Berdasarkan pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No.24/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus disebutkan bahwa pelaksanaan Surat Teguran adalah 7 hari setelah saat jatuh tempo pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Setelah Surat Teguran diterbitkan kemudian diikuti dengan penerbitan Surat Paksa (SP) yang dilakukan setelah lewat dari 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran dan Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya.

Surat Paksa akan jatuh tempo dalam waktu dua kali dua puluh empat jam (2x24 jam) dan bila selama periode waktu tersebut utang pajak belum juga dilunasi oleh Wajib Pajak, maka pejabat pajak akan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Jika Utang Pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat

belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka pejabat segera melakukan pengumuman lelang. Pejabat pajak segera melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang.

5.3 Peranan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) dalam Meningkatkan Informasi Piutang Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian maka Peranan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) dalam meningkatkan informasi piutang pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) Ciamis, sudah termasuk kategori baik. Aspek teknologi informasi merupakan suatu pembaharuan fasilitas pelayanan KPP kepada wajib pajak yang berbasis atas perkembangan teknologi informasi yaitu dengan adanya *e-system* dan media informasi pajak. Pada seksi pelayanan KPP Ciamis *e-system* juga diterapkan di TPT (tempat pelayanan terpadu) dimana TPT merupakan fasilitas pelayanan yang berhubungan langsung dengan wajib pajak dan salah satu fasilitas *e-system* yang dilaksanakan adalah pendaftaran wajib pajak secara *online* melalui *e-registration*. *e-registration* merupakan fasilitas pendaftaran wajib pajak melalui media internet yang langsung terhubung pada sistem komputer di TPT *counter* 3 pada KPP Ciamis sehingga wajib pajak tidak perlu lagi mengisi dokumen dan menunggu lama untuk mendaftarkan diri karena petugas TPT sudah memiliki data wajib pajak yang telah mendaftar melalui *e-registration* dan salah satu keuntungan bagi wajib pajak akan fasilitas yang modern ini adalah dari segi waktu dimana saat wajib pajak mendaftarkan diri di KPP saat itu pula wajib pajak akan langsung mendapatkan kartu NPWP.

Selain *e-registration* TPT KPP Ciamis juga menyediakan fasilitas pelayanan *e-SPT*. *e-SPT* merupakan cara penyampaian surat pemberitahuan pajak (SPT) melalui media digital, pelayanan *e-SPT* pada TPT disediakan di *counter* 4,5, dan 6. Fasilitas pelayanan ini bagi wajib pajak dapat mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pembaharuan fasilitas pelayanan yang

berdasarkan teknologi informasi dilakukan untuk wajib pajak dan juga pegawai pajak.

Selain modernisasi pada aspek teknologi informasi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis juga melaksanakan pengembangan dari aspek perangkat keras dan perangkat lunak. Aspek perangkat keras merupakan suatu proses pembaharuan yang meliputi dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sedangkan perangkat lunak merupakan proses pembaharuan meliputi struktur organisasi, kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi agar lebih efektif dan efisien. Beberapa hal yang dilakukan dalam penerapan modernisasi perangkat keras dan lunak pada seksi pelayanan adalah dengan penyediaan sarana penunjang bagi pelaksanaan perpajakan di tempat pelayanan terpadu (TPT) misalnya komputer di setiap counter, *printer*, mesin fotokopi dan sarana lainnya yang menunjang bagi petugas pajak.

Berdasarkan uraian di atas, Azhar Susanto (2004: 82) menjelaskan bahwa sistem informasi dari komponen-komponen yang disebutnya dengan istilah integrasi dari berbagai siklus pengolahan transaksi. Dalam setiap pengolahan transaksi yang dilakukan, SPT atau SIA menggunakan berbagai yang dimilikinya seperti komponen bangunan (*hardware*), komponen sistem masukan (*software*), komponen menjalankan sistem (*brainware*), rangkaian aktivitas sistem (prosedur), basis data (*database*), jaringan komunikasi (*network*). Sebagai suatu sistem, keenam sistem pengolahan transaksi tersebut saling berinteraksi satu sama lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai sarannya.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Sistem administrasi perpajakan modern (SAPM) yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis telah cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari tiga sunsur pokok yakni aspek teknologi informasi; aspek perangkat keras dan perangkat lunak; dan aspek sumber daya manusia.
2. Informasi piutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis cukup memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pencairan piutang dari tahun 2012 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan yang signifikan.
3. Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciamis berperan dalam meningkatkan informasi piutang pajak.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. KPP Pratama Ciamis diharapkan terus menggunakan sistem administrasi perpajakan modern (SAPM), mengingat fungsi dan kemanfaatannya sangat banyak terutama untuk menganalisis piutang pajak.
2. Adanya perbaikan diberbagai sistem administrasi perpajakan modern (SAPM), terutama dalam hal Teknologi informasi; penyediaan perangkat; dan SDM yang menjalankannya, seperti (1) terjadinya gangguan atau masalah dari segi teknis sehingga dalam proses *input* data menjadi terhambat; (2) kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang *e-system*; (3) masih terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan *Standard Operating Procedures* (SOP); (4) sarana dan prasarana kurang mendukung; (5) jumlah pegawai masih kurang, sehingga tidak terjadi kesalahan yang merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-36/PJ.2004 tanggal 12 Februari 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ./2003 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/PJ./2003 tanggal 12 Maret 2003 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 512/KMK.03/2004 tanggal 29 Oktober 2004 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Dan Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 536/KMK.04/2000 tanggal 28 Februari 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 536/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan.
- LAN RI. 2001. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ridwan, Purnama. 2007. *Perpajakan*. Jakarta : Pustaka Pribadi
- Santoso Brotodihardjo, 2003. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Lampiran 1

FOMULIR EVALUASI ATAS CAPAIAN LUARAN KEGIATAN

Ketua : Benny Prawiranegara, S.E., M.M.
Perguruan Tinggi : Universitas Galuh Ciamis
Judul : Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) dalam Meningkatkan Informasi Piutang Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Ciamis)
Waktu Kegiatan : Tahun ke satu dari rencana satu tahun

Luaran yang direncanakan dan capaian tertulis dalam proposal awal :

No	Luaran yang direncanakan	Capaian
1.	Publikasi Ilmiah	Sudah diterima

PUBLIKASI ILMIAH

	Keterangan
Nama jurnal yang dituju	Jawara Universitas Galuh Ciamis
Klasifikasi Jurnal	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi
<i>Impact Factor</i> jurnal	
Judul artikel	Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) dalam Meningkatkan Informasi Piutang Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Ciamis)
Status naskah (beri tanda <input type="checkbox"/>)	
- Draf artikel <input type="checkbox"/>	
- Sudah dikirim ke jurnal <input type="checkbox"/>	
- Sedang ditelaah <input type="checkbox"/>	
- Sedang direvisi <input type="checkbox"/>	
- Revisi sudah dikirim ulang <input type="checkbox"/>	

- Sudah diterima	<input checked="" type="checkbox"/>	Bukti Terlampir
- Sudah terbit	<input type="checkbox"/>	

Ciamis, 21 November 2016

Ketua,



Benny Prawiranegara, S.E., M.M.
NIK. 03.7112770209

Lampiran 2

BIODATA TIM PENELITI

Biodata Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Benny Prawiranegara, S.E., M.M.
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIK	03.3112770209
5.	NIDN	0401078402
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Cirebon, 01 Juli 1984
7.	E-mail	Benny.feunigal@gmail.com
8.	Nomor Telepon/HP	085221532560
9.	Alamat Kantor	Jln. RE. Martadinata No. 150 Ciamis Jawa Barat
10.	Nomor Telepon/Faks	(0265) 772060
11.	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1 = 520 Orang
12.	Mata Kuliah yang Diampu	<ol style="list-style-type: none">1. Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro2. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro3. Akuntansi Manajemen4. Akuntansi Biaya

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Galuh Ciamis	Universitas Galuh Ciamis
Bidang Ilmu	Akuntansi	Manajemen
Tahun Masuk-Lulus	2002-2006	2008-2010
Judul Skripsi/Tesis	Analisis Hubungan Variance Biaya Produksi Dengan Efisiensi Biaya Produksi Pada PDAM Tirta Galuh Ciamis Kabupaten Ciamis	Studi Persepsional Tentang Pengaruh Kemampuan Manajerial dan Motivasi Pimpinan Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupaten Ciamis
Nama Pembimbing	Dr. H. Dadang Sadeli, M.Si	Prof. Dr. H. Suryana, M.Si.

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1.	2008	Pengaruh Partisipasi anggaran Terhadap Kinerja Mnajerial Pada Perusahaan Toha Group Tasikmalaya	Mandiri	Rp 3.500.000,-
2.	2009	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0.102 Tentang	Mandiri	Rp 3.500.000,-

		Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli Murabahah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Cabang Ciamis)		
3.	2010	Analisis Sosial Ekonomi Keberadaan Pasar Tradisional serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Rangka Pendirian Pajajaran Depstore di Kota Banjar	Pemilik Pajajaran Depstore	Rp 4.000.000,-
4.	2011	Analisis Sosial Ekonomi Keberadaan Pasar Tradisional serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Rangka Pendirian Ciamis Mall di Kabupaten Ciamis Tahun 2011	Pemerintah Kabupaten Ciamis	Rp 10.000.000,-
5.	2012	Ramalan Penjualan Untuk Menentukan Perencanaan Produksi (Studi Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis)	LPPM Universitas Galuh Ciamis	Rp. 4.500.000,-
6.	2013	Activity Based Management (ABM) dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya (Studi Pada Perusahaan Mayasari Group Tasikmalaya)	Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Rp 13.000.000,-
7	2014	Activity Based Management (ABM) dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya (Studi Pada Perusahaan Mayasari Group	LPPM Universitas Galuh Ciamis	Rp 6.500.000,-

		Tasikmalaya) (Penelitian Lanjutan)		
--	--	---------------------------------------	--	--

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1.	2008	Pendidikan dan pelatihan sistem pembukuan sederhana pada kelompok masyarakat pengrajin (Home Industri) di kecamatan Sadananya Ciamis	Kecamatan Sadananya Ciamis	Rp 1.500.000
2.	2009	Coaching dan Conseling tentang kewirausahaan pada kelompok Karang Taruna Desa Mekarjadi Ciamis	Desa Mekarjadi Ciamis	Rp 1.500.000
3.	2010	Pelatihan Akuntansi bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Ciamis	Partai Demokrat DPC Ciamis	Rp 3.000.000
4	2011	Tim Audit Independen untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kota Banjar	PNPM Mandiri Kota Banjar	Rp 10.000.000
5.	2012	Tim Audit Independen untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kabupaten	PNPM Mandiri Kabupaten Tasikmalaya	Rp. 15.000.000

		Tasikmalaya		
6.	2015	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Masjid di Kecamatan Kertasari Kabupaten Ciamis	LPPM Universitas Galuh Ciamis	Rp. 5.000.000,-

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1.	Ramalan Penjualan Untuk Menentukan Perencanaan Produksi (Studi Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis)	Economic Publish	I/I/2012
2.	Activity Based Management (ABM) dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya (Studi Pada Perusahaan Mayasari Group Tasikmalaya)	Cakrawala Galuh	4/4/2014

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun

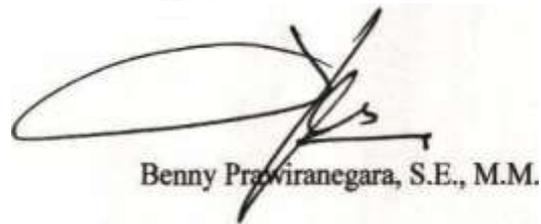
No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Nama Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Deseiminasi Penelitian Dosen Pemula	Activity Based Management (ABM) dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya (Studi Pada Perusahaan Mayasari Group Tasikmalaya)	23 Desember 2013, Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari

ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu syarat dalam pengajuan Hibah Penelitian Dosen Pemula.

Ciamis, 21 November 2016
Ketua



Benny Prawiranegara, S.E., M.M.

Biodata Anggota Peneliti

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Mujaddid Faruk, SE., M.M.
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIK	033112770170
5.	NIDN	0424057301
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Ciamis, 24 Mei 1973
7.	E-mail	
8.	Nomor Telepon/HP	087822022040
9.	Alamat Kantor	Jln. RE. Martadinata No. 150 Ciamis Jawa Barat
10.	Nomor Telepon/Faks	0265-772060
11.	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1 = 295 Orang; S-2 = - orang; S-3 = - orang
12.	Mata Kuliah yang Diampu	1. Manajemen Operasional 2. Manajemen Bank Syariah 3. Teknologi Informasi

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Galuh Ciamis	Universitas Galuh Ciamis
Bidang Ilmu	Manajemen	Manajemen
Tahun Masuk-Lulus	1998-2002	2008-2010
Judul Skripsi/Tesis	Peran Pengembangan Produk Dalam Peningkatan Laba (Studi Pada Golden Fish Fishing Tackle)	Pengaruh Iklim Organisasi dan Kondisi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Kasus Pada PT. Pos Indonesia Kabupaten Ciamis)
Nama Pembimbing	C. Maman Abdulrachman, Drs., M.M.	Prof. Dr. Koswara H.S.

D. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1.	2011	Perilaku Pasar Sapi dan Potensi Pengembangannya	LPPM Unigal	Rp 4.500.000,-

E. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1.	2012	Pemanfaatan Potensi Wisata Situ Wangi Untuk Menumbuhkan Ekonomi Rakyat Sekitarnya Dengan Pembuatan Perahu Wisata Dari Piva PVC	LPPM Unigal	5.000.000

F. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu syarat dalam pengajuan Hibah Penelitian Dosen Pemula.

Ciamis, 21 November 2016

Pengusul,



Mujaddid Faruk, S.E., M.M.

Lampiran 3
Surat Keterangan Publikasi

	UNIVERSITAS GALUH FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN : TERAKREDITASI "B" SK. NO. 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 PROGRAM STUDI AKUNTANSI : TERAKREDITASI "B" SK. NO. 408/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 Jl. RE. Martadinata No. 150 Telp/Fax. (0265) 772060 - 778374 Ciamis 46251
SURAT KETERANGAN No. 526/SK/AK/K/XI/2016	
Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeristas Galuh Ciamis, menerangkan Bahwa :	
Nama	: Benny Prawiranegara, S.E., M.M.
Unit Kerja	: Program Studi Akuntansi
Nama tersebut diatas benar telah mengirimkan naskah jurnal penelitian berjudul "Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM) dalam Meningkatkan Informasi Piutang Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Ciamis)" dan akan diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Jawara Volume 3 Nomor 2, Desember 2016 yang diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis.	
Demikian keterangan ini dibuat dengan penuh kesadaran agar dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Dikeluarkan di : Ciamis Tanggal : 14 November 2016 Ketua Studi Akuntansi FE Unigal,	
 Benny Prawiranegara, S.E., M.Si NIP. 197504242002121007	